

# PENGARUH KINERJA CALON BUPATI PETAHANA TERHADAP PREFERENSI PEMILIH (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jember)

Naskah diterima tanggal 8 Februari 2013, disetujui tanggal 18 Juni 2013

Nakkok Aruan, *Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur*  
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya, Telp. (031) 8280738; HP 081331388892  
Email : nakkokaruan@yahoo.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (a) untuk mengetahui apakah karakteristik sosial, ekonomi dan politik pemilih berhubungan dengan dan atau berpengaruh terhadap preferensi pemilih pada pilkada; dan (b) untuk mengetahui apakah kinerja dan kualitas calon bupati yang sedang menjabat atau petahana (*incumbent*) berpengaruh atau berkorelasi dengan preferensi pemilih pada pilkada. Untuk keperluan tersebut penelitian ini mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan serta keaktifan dalam organisasi kemasyarakatan tidak dapat dibuktikan dan atau tidak memiliki signifikansi terhadap preferensi pemilih pada pilkada, sedangkan identifikasi partai politik responden masih signifikan berpengaruh terhadap preferensi pemilih pada pilkada. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pertimbangan rasional pemilih, terutama berkaitan dengan kinerja dan kualitas calon bupati petahana selama menjabat terhadap preferensi pemilih pada pilkada.

Kata kunci : *pilkada, kinerja petahana (incumbent), preferensi pemilih*

## Abstract

*The goal of the research is : (a) for knowing are the social, economic and politic characteristic of the voter related with or influenced to voter preference to local election? and (b) for knowing are the performance and quality of an incumbent candidate have influenced and correlated with the voter preference to local election?. By using the combination of qualitative and quantitative methods the result of the research found that characteristic of genitals, age, work, education, and social organization activities can't prove or haven't significant to the voter preference to local election. Whereas identify of the politic party still influenced significantly to the voter preference to local election. And then there was significant correlation between rational reasons of the voter, mainly it was related with incumbent performance and quality before to the voter preference to local election.*

*Keywords : the local election, incumbent performance, voter preference*

## PENDAHULUAN

Kemenangan setiap pasangan calon kepala daerah dalam pilkada ditentukan oleh beberapa unsur pendukung utama, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh calon kepala daerah (Surbakti, 1998:142). Unsur-unsur tersebut merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh para pasangan kepala daerah yang akan mengikuti pilkada. Ketiga modal tersebut tidak harus seluruhnya dimiliki atau dikuasai oleh pasangan calon. Banyak realita di lapangan

menunjukkan bahwa pasangan calon peserta pilkada hanya memiliki satu atau dua modal pendukung saja.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kemenangan terbesar akan diraih oleh pasangan calon yang dapat mengakumulasikan ketiga unsur pendukung tersebut. Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun kekuatan-kekuatan politik lokal yang dipandang sebagai representasi rakyat. Menurut Berman (dalam Asfar, 2006:23) modal politik mempunyai peran yang sangat penting karena sistem pilkada yang kita gunakan memakai

mekanisme "party system", dimana setiap orang yang akan mencalonkan diri harus melalui pintu partai politik.

Unsur pendukung selanjutnya adalah unsur modal sosial, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Contohnya, tingkat popularitas pasangan calon dimata pemilih dan sejauh mana hubungan yang tercipta di antara pasangan calon dengan pemilihnya sehingga pasangan calon tersebut dapat meyakinkan pemilih untuk memilihnya. Dalam hal ini, pasangan calon yang dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat mempunyai peluang yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi dalam pilkada.

Menurut Marijan (2006:96) unsur pendukung yang terakhir adalah ekonomi. Unsur atau modal ini tidak kalah pentingnya dengan dua unsur pendukung sebelumnya, karena selain untuk membiayai kampanye, namun juga untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Meski demikian, menurut Gaffar (1992:159-174) pengaruh ini tidak terlalu dominan.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah telah dapat dipastikan bila semua pasangan calon yang tergolong petahana (*incumbent*) memiliki ketiga unsur tersebut. Tingginya perolehan suara yang dikantongi pasangan calon petahana Bupati Mojokerto periode tahun 2000-2005 Ahmady pada pilkada Kabupaten Mojokerto membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingginya perolehan suara pasangan tersebut. Salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi pilihan politik pemilih pada saat pilkada sehingga menyebabkan kemenangan pasangan tersebut adalah karena salah satu calon berasal dari pejabat yang notabene sudah pernah dirasakan kualitas kerjanya oleh masyarakat.

Namun, alasan ini agaknya dapat dibantah dengan mudah dikarenakan banyak juga kontestan petahana dalam pilkada di kabupaten dan kota lainnya yang justru mengalami kekalahan, salah satunya di Kabupaten Jember, yakni Syamsul Hadi Siswoyo yang menjabat Bupati Jember periode tahun 2000-2005. Padahal dari segi ekonomi, Syamsul memiliki modal yang memadai. Jika pada

pilkada Kabupaten Mojokerto yang menghasilkan kemenangan pasangan petahana dengan angka yang cukup signifikan, yaitu 88%, maka pada pilkada Kabupaten Jember justru menghasilkan kekalahan yang cukup signifikan pula bagi calon pasangan petahana, yaitu hanya memperoleh suara sebesar 28%. Menurut Kacung Marijan (2006:96), kemenangan Ahmady salah satunya karena dia menguasai hampir seluruh kantong-kantong suara.

Kekontrasan perolehan suara pasangan calon petahana pada 2 kabupaten yang berbeda tersebut menggugah peneliti untuk mengajukan hipotesa bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya suara yang diperoleh pasangan calon yang berasal dari evaluasi masyarakat dalam hal ini pemilih terhadap kinerja serta kualitas calon petahana tersebut.

Selain itu, berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli politik, juga ada hipotesa yang menyatakan bahwa karakteristik sosial masyarakat di daerah bersangkutan seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik yang dipilih pemilu juga berhubungan dengan preferensi pemilih pada pilkada. Oleh karena itu, setelah didapatkan jawaban dari hipotesa-hipotesa tersebut, peneliti akan mencoba membandingkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilkada di Kabupaten Mojokerto dengan pilkada di Kabupaten Jember, hingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni: (a) Apakah preferensi pemilih pada saat pilkada berhubungan dengan karakteristik sosial, ekonomi dan politik?; dan (b) Apakah preferensi pemilih pada saat pilkada berhubungan dengan kualitas serta kinerja calon petahana?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian tindakan (*action research*), di mana peneliti bertujuan mengidentifikasi hubungan antara karakteristik sosial, ekonomi dan politik pemilih serta kualitas dan kinerja calon petahana dengan preferensi pemilih pada saat pilkada. Selain itu, penelitian ini dapat pula

disebut sebagai penelitian deskriptif eksplanatif, karena selain bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi, ingin melihat hubungan kausalitas diantara gejala-gejala yang terangkum dalam variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1989:4-5).

Melihat permasalahan dalam penelitian ini yang pada dasarnya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test kuesioner. Oleh sebab itu penelitian ini juga mengedepankan pendekatan kualitatif. Selain itu, karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori, maka diperlukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling mendukung.

Teknik pengambilan sampel untuk pendekatan kuantitatif menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Neuman (1991:127), yakni:

$$n = \frac{N Z^2 P (1-P)}{(N-1) d^2 + [Z^2 P (1-P)]}$$

Dimana:

$n$  = Besar sampel

$N$  = Jumlah populasi

$P$  = proporsi = 0,5

$Z^2$  = Derajat kepercayaan 95%, maka  $Z$  adalah 1,96

$d$  = presisi yang diinginkan dalam penelitian ini 5% (0,05)

Berdasarkan rumus yang diajukan oleh Neuman di atas, maka hasil penghitungan untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini minimal adalah 383 di Kabupaten Mojokerto dan 415 di Kabupaten Jember yang pengambilannya menggunakan teknik *proporsional random sampling*. Sementara untuk pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil sampel untuk *indepth interview* sebanyak 30 *key informan*. Teknik pengambilan sampel untuk *key informan* yaitu dengan teknik *purposive*, dan bersifat *snowball sampling*.

Data primer dalam penelitian ini di kumpulkan melalui angket dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Selain itu, juga dilakukan observasi secara terbatas. Sedangkan

data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan, instansi atau dinas terkait.

Data dianalisis dengan bantuan perangkat computer menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Teknik analisis data dari penelitian ini adalah analitik, yakni: (a) Komparasi dengan uji *Chi-Square*; dan (b) Korelasi yaitu uji *coeficien contingency*. Uji statistik digunakan pada interval kepercayaan 95% atau *level of significancy* 5% (0,05). Hipotesis nihil ( $H_0$ ) ditolak jika  $p < \alpha$ , bila  $H_0$  ditolak maka variabel yang diteliti dinyatakan ada perbedaan atau ada hubungan yang signifikan. Sebaliknya jika  $p > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima berarti antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak ada perbedaan atau hubungan.

Teknik analisis data secara kualitatif penelitian ini adalah dengan teknik analisis deskriptif analitik dan *interpretative validity*, dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai hubungan antara karakteristik sosial, ekonomi dan politik pemilih serta kualitas dan kinerja calon petahana dengan preferensi pemilih pada saat pilkada.

Validitas dan realibilitas yang dipakai untuk data kuantitatif adalah dengan menguji kuesioner tertutup. Di samping dengan uji kuesioner, validitas dan realibilitas penelitian juga diuji dengan program SPSS untuk mengetahui kevalidan data. Uji validitas dan realibilitas data kuantitatif yaitu dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, memberchek, dan analisis kasus negatif.

## HASIL PENELITIAN

### a. Hubungan Karakteristik Sosial, Ekonomi, Politik dengan Preferensi Pemilih

Karakteristik dan latar belakang sosiologis seperti pengelompokan umur dianggap oleh pendekatan sosiologis mempunyai peran yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial, seperti keanggotaan seseorang dalam berbagai jenis organisasi yang pada tahap selanjutnya akan berperan penting dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang termasuk terhadap pilihan politik mereka.

Namun, ketika dilakukan perhitungan *chi*

square untuk mencari signifikansi hubungan antara usia dengan pilihan politik pada pilkada, diperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,673$ ;  $p = 0,412$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,677$ ;  $p = 0,411$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  untuk pilkada Kabupaten Jember diterima, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan pilihan politik pada saat pilkada.

Sementara penelitian tentang hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan politik dari pemilu ke pemilu menunjukkan hubungan yang tidak konsisten. Salah satu penjelasannya antara lain adalah ketidaksukaan perempuan terhadap isu-isu perang, sehingga mereka lebih mendukung pada partai yang menghendaki berakhirnya perang termasuk pengurangan anggaran terhadap persenjataan (Asfar, 2006:139). Begitu juga penelitian oleh Rosenthal (dalam Asfar, 2006: 139) yang menggambarkan bahwa perempuan lebih suka memilih kandidat sesama perempuan.

Ketika dilakukan perhitungan *chi square* untuk mencari signifikansi hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan politik pada pilkada, diperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,779$ ;  $p = 0,377$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,816$ ;  $p = 0,282$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan politik pada saat pilkada.

Karakteristik sosial seperti pekerjaan, dalam khasanah pendekatan sosiologis juga dianggap dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Karena pekerjaan, penghasilan dan pemilikan tabungan menurut Gerald Pomper dapat dikategorikan kedalam predisposisi sosial ekonomi pemilih (Asfar, 2006:138). Namun pada penelitian ini berdasarkan pada data yang diperoleh, diketahui bahwa tidak ada signifikansi hubungan antara jenis pekerjaan dengan pilihan politik pada pilkada.

Perhitungan *chi square* untuk mencari signifikansi hubungan antara pekerjaan dengan pilihan politik pada pilkada, memperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 1,212$ ;  $p = 0,750$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada

Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,816$ ;  $p = 0,282$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan politik pada saat pilkada.

Selanjutnya pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan struktur afektif, kognitif dan psikomotorik seseorang. Pendidikan dapat membuat seseorang semakin berpikir rasional dan konkrit dalam memahami berbagai fenomena atau permasalahan yang dihadapi atau ditemuinya dalam kehidupan. Sehingga kemudian pendidikan juga dapat digunakan sebagai salah satu bagian untuk memahami perilaku memilih seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Ketika dilakukan perhitungan *chi square* untuk mencari signifikansi hubungan antara tingkat pendidikan dengan pilihan politik pada pilkada, diperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 0,359$ ;  $p = 0,986$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 1,212$ ;  $p = 0,617$ , dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan pilihan politik pada saat pilkada.

Sedangkan keikutsertaan dalam organisasi-organisasi, baik itu organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan lain sebagainya; baik itu yang sifatnya informal maupun formal merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok tersebut mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang (Asfar, 2006:138).

Namun setelah dilakukan uji *chi square* untuk mencari signifikansi hubungan antara ormas dengan pilihan politik pada pilkada, diperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 4,495$ ;  $p = 0,106$  dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 2,614$ ;  $p = 0,122$  dengan  $\alpha = 0,05$ , maka  $p > \alpha$  sehingga  $H_0$  diterima untuk pilkada Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara ormas dengan pilihan

politik pada saat pilkada.

Sedangkan ketika dilakukan perhitungan *chi square* untuk mencari hubungan antara partai politik yang dipilih pada Pemilu 2004 dengan pilihan politik pada pilkada diperoleh nilai *chi square*  $\chi^2 = 1,49,493$ ;  $p=0,000$ , dengan  $\alpha=0,05$  maka  $p < \alpha$  sehingga  $H_0$  ditolak untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan nilai *chi square*  $\chi^2 = 1,493$ ;  $p=0,000$ , dengan  $\alpha=0,05$  maka  $p < \alpha$  sehingga  $H_0$  ditolak untuk pilkada Kabupaten Jember, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara partai politik yang dipilih pada Pemilu 2004 dengan pilihan politik pada saat pilkada.

#### b. Hubungan Kualitas dan Kinerja Calon Petahana dengan Preferensi Pemilih

Selanjutnya status pejabat bupati petahana (*incumbent*) menyebabkan pemilih seringkali menggunakan hasil kinerja pada periode sebelumnya untuk menilai kapabilitas seorang calon pemimpin. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 10 bidang sebagai garis besar indikator penelitian, yaitu bidang pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, industri, pertanian, keagamaan dan olahraga.

Pada bidang pemerintahan yang meliputi segala proses yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan serta hasilnya, terdapat 363 orang atau (79,2%) responden yang menganggap kinerja Ahmady baik dan sisanya sebanyak 20 orang atau (20,8%) responden menganggap sebaliknya. Sementara itu, terdapat 125 orang atau (30%) responden yang menganggap kinerja Syamsul baik dan sisanya sebanyak 290 orang atau (70%) responden menganggap sebaliknya.

Di bidang industri yang meliputi penanganan terhadap masalah industri kecil, menengah sampai industri besar, Ahmady secara mayoritas dianggap berhasil dengan 302 orang atau (78,9%) menganggap kinerjanya baik dan sisanya sebanyak 81 orang atau (21,1%) menganggap sebaliknya. Sedangkan penilaian terhadap Syamsul menunjukkan 384 orang atau (93%) menganggap kinerjanya buruk dan hanya 31 orang atau (7%) menganggap sebaliknya.

Pada bidang pariwisata yang meliputi semua proses dan penanganan terhadap obyek-

obyek wisata serta kegiatan-kegiatan kepariwisataan, kinerja Ahmady dinilai baik oleh 331 orang atau (86,5%) responden dan sisanya sebanyak 52 orang atau (13,5%) responden menganggap sebaliknya. Sedangkan penilaian terhadap Syamsul menunjukkan 276 orang atau (67%) responden menilai baik dan sisanya sebanyak 139 orang atau (33%) responden menganggap sebaliknya.

Selain itu, pada bidang pertanian, Ahmady juga dianggap mempunyai keberhasilan yang tinggi. Hal ini terlihat dengan diperolehnya angka 278 orang atau (72,4%) untuk penilaian baik yang diberikan oleh responden, dan sisanya sebanyak 105 orang atau (27,6%) menganggap sebaliknya, Sementara penilaian terhadap Syamsul sangat dipengaruhi oleh seringnya terjadi kelangkaan pupuk dan turunnya harga gabah pada musim panen di Kabupaten Jember, sehingga lebih dari separuh responden (55%), atau sebanyak 228 orang menilai buruk kinerja Syamsul dalam bidang pertanian, sementara sisanya sebanyak 187 orang atau (45%) menyatakan sebaliknya.

Keberhasilan mutlak diraih Ahmady dalam bidang keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan penilaian baik pada kinerjanya tersebut oleh seluruh responden. Sementara penilaian terhadap Syamsul menunjukkan hanya 200 orang atau sekitar (48%) responden yang menilainya baik, sedangkan 215 orang responden yang lain atau sekitar (52%) menganggap buruk kinerjanya.

Fenomena yang agak berbeda terlihat pada bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan olahraga, Pada bidang pendidikan yang meliputi segala proses serta hasil kinerjanya dalam bidang pendidikan baik pendidikan informal maupun non informal serta peningkatan kualitas SDM warga Kabupaten Mojokerto, terdapat 256 orang atau (66,9%) yang menganggap kinerja Ahmady pada bidang pendidikan buruk, dan sisanya sebanyak 127 orang atau (33,1%) responden menganggap baik. Pada bidang ketenagakerjaan, 309 orang atau (80,7%) menganggap kinerja Ahmady pada bidang tersebut buruk dan sisanya sebanyak 74 orang atau (19,3%) menganggap kinerjanya masih dalam tataran baik. Sama halnya pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, kinerja Ahmady pada periode sebelumnya dianggap sangat terpuruk juga pada bidang olahraga. Sebanyak 306 orang atau (79,9%)

responden menganggap kinerja Ahmady pada bidang tersebut buruk, sedangkan sisanya sebanyak 77 orang atau (20,1%) menganggap sebaliknya.

Sementara penilaian masyarakat terhadap kinerja Syamsul di bidang pendidikan menunjukkan sebanyak 277 orang atau sekitar (67%) menilai baik, sedangkan sebanyak 138 orang atau (33%) masih menganggap kinerjanya buruk. Pada bidang ketenagakerjaan dan olahraga, terjadi dua fenomena yang agak berbeda, yaitu bila Syamsul sangat terpuruk pada bidang Ketenagakerjaan dengan komposisi angka 302 orang atau (75%) menilai buruk dan hanya 103 orang atau (25%) yang menyatakan baik, maka di bidang olahraga, masyarakat agaknya merespon baik kinerja Syamsul. Hal ini terbukti dari komposisi angka 358 (86%) orang menyatakan kinerjanya tergolong baik, dan sisanya yang hanya sebanyak 57 (14%) orang yang menyatakan kinerjanya buruk.

Bidang pelayanan publik, yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan pelayanan terhadap kepentingan terhadap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, SIM, surat tanah, akta lahir, dan sebagainya. Kali ini Ahmady dinilai oleh 252 orang atau (65,9%) responden baik, dan sisanya sebanyak 131 orang atau (34,1%) menganggap kinerjanya masih buruk. Sedangkan terhadap kinerja Syamsul dalam bidang pelayanan publik sebanyak 152 orang atau (37%) responden menilai kinerjanya baik, dan sisanya sebanyak 263 orang, atau (63%) menganggap kinerjanya masih buruk.

Selanjutnya Salah satu wujud dari rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya pada saat pilkada adalah dengan mempertimbangkan kualitas figur calon yang akan dipilihnya. Para pemilih kerap kali menjadikan pertimbangan kualitas sebagai pertimbangan utama dalam menentukan calon yang akan dipilihnya. Permasalahan kualitas ini di satu pihak dapat menguntungkan calon yang mempunyai tingkat popularitas yang tinggi dalam masyarakat, namun bisa juga menjadi bumerang bagi calon tersebut, tergantung bagaimana opini dalam masyarakat tentang kualitas calon tersebut terbentuk.

Ahmady, dalam hal ini, termasuk salah satu calon yang mendapat dampak positif dari opini mengenai kualitasnya sebagai bupati *incumbent*

dalam masyarakat kabupaten Mojokerto. Perjalanan kariernya sebagai Bupati periode 2000-2005 yang nyaris tanpa masalah membuat dia mendapat penilaian sebagai figur bupati yang bersih dari KKN dengan prosentase (59,1%) atau sebanyak 227 orang dari keseluruhan responden yang berjumlah 383. Selain dianggap mempunyai kualitas bersih dari KKN yang cukup, Ahmady juga dianggap sebagai figur bupati yang mempunyai komitmen dalam pemberantasan KKN. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahannya periode 2000-2005, jarang sekali ditemukan adanya kasus korupsi pada bidang-bidang pemerintahannya.

Sementara Syamsul Hadi Siswoyo termasuk sebagai salah satu kepala daerah petahana (*incumbent*) yang kurang beruntung, karena tingginya penilaian buruk yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap kualitasnya selama menjabat. Penilaian sebagai figur bupati yang bersih dari KKN rupanya direspon masyarakat kurang baik dengan adanya persentase (84%) atau sebanyak 348 orang dari keseluruhan responden yang berjumlah 415. Selain itu, Syamsul juga dianggap sebagai figur bupati yang gagal dalam pemberantasan KKN. Hal ini dikarenakan pada masa ia menjabat sebagai Bupati Jember periode tahun 2000-2005, masyarakat melihat banyak sekali terjadi kasus korupsi termasuk yang melibatkan dirinya sendiri.

Selanjutnya figur Ahmady sebagai bupati yang dikenal sering melakukan turba (turun ke bawah) menjadi keunggulan lain di mata konstituennya. Sebanyak 359 orang atau (93,8%) responden mengakui bahwa sosok Ahmady mempunyai kedekatan dengan rakyat yang cukup tinggi, dan hanya 24 orang atau (6,3%) responden berpendapat sebaliknya. Selain itu, pesatnya perkembangan Kabupaten Mojokerto pada masa kepemimpinan Ahmady, terutama di bidang perindustrian dan pembangunan sarana dan prasarana umum membuat 281 orang atau (73,2%) responden menganggap sosok Ahmady sebagai bupati yang mempunyai komitmen yang tinggi pada pembangunan.

Sedangkan Syamsul Hadi hanya sebanyak 202 orang atau (49%) responden menilai bahwa sosok Syamsul Hadi mempunyai kedekatan dengan rakyat yang cukup tinggi, tetapi 213 orang atau (51%) responden berpendapat sebaliknya. Di samping itu, kurang pesatnya

perkembangan di Kabupaten Jember pada masa kepemimpinan Syamsul diakibatkan banyaknya kasus-kasus korupsi dalam birokrasinya menyebabkan 312 orang atau (%) responden menganggap sosok Syamsul sebagai bupati yang gagal memenuhi komitmen pembangunan.

Fenomena yang agak berbeda terlihat pada penilaian responden mengenai kualitas yang dimiliki Ahmady untuk mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih tetap tinggi pada masa pemerintahan Ahmady yang disebabkan adanya krisis perekonomian di tingkat nasional menyebabkan sebanyak 202 orang atau (52,6%) responden menganggap Ahmady tidak dapat mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Sedangkan penilaian responden mengenai kualitas yang dimiliki Syamsul untuk mengentaskan kemiskinan jauh lebih buruk, dimana tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jember menyebabkan masyarakat menganggap kualitas Syamsul sangat rendah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat dari komposisi penilaian buruk yang diberikan oleh masyarakat mencapai angka 384 orang atau (93%).

Terkait dengan penilaian responden terhadap kualitas Ahmady, peneliti selanjutnya memberikan skor untuk setiap pernyataan, yaitu "7" untuk pernyataan "tidak" dan "2" untuk pernyataan "ya" yang diberikan oleh responden dan menjumlahkannya sehingga kemudian diperoleh kategori jumlah skor, yaitu "5-7" untuk buruk dan "8-10" untuk "baik". Berdasarkan penjumlahan skor atas data yang telah diperoleh peneliti, terdapat 281 orang atau (73,2%) responden yang menilai kualitas Ahmady baik, dan sisanya sebanyak 102 orang atau (26,8%) menganggap kualitas Ahmady tergolong buruk. Sementara penilaian responden terhadap kualitas Syamsul berdasarkan penjumlahan skor atas, terdapat 392 orang atau (94%) responden yang menilai kualitas Syamsul buruk, dan sisanya sebanyak 23 orang atau (6%) menganggap kualitas Syamsul baik.

## PENUTUP

### a. Kesimpulan

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik atau latar belakang sosiologis seperti pengelompokan umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan serta

keaktifan responden pada suatu organisasi kemasyarakatan tertentu ternyata tidak memiliki signifikansi hubungan dengan pilihan politik mereka pada saat pilkada.

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa khusus faktor identifikasi partai politik masih signifikan berpengaruh pada perilaku perilaku memilih responden melalui pilihan politik mereka pada saat pilkada. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah adanya anggapan bahwa calon yang berasal dari partai yang sama akan dapat lebih mewakili aspirasinya sebagai konstituen.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pertimbangan-pertimbangan rasional pemilih, terutama dalam hal ini penilaian terhadap kinerja dan kualitas calon bupati petahana terhadap pilihan politik mereka pada Pilkada.

### b. Rekomendasi

*Pertama*, untuk memahami perilaku memilih pendekatan rasional (*rational choice*) merupakan sebuah pendekatan yang cukup valid dalam pilkada.

*Kedua*, pendekatan rasional (*rational choice*) ini lebih relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat modern yang mulai menyebar ke kota-kota kecil dan daerah-daerah pedesaan di Indonesia.

*Ketiga*, jika kemudian mayoritas para pemilih dalam pilkada menggunakan pendekatan rasional (*rational choice*), maka seleksi bakal calon pada pilkada ke depan akan lebih berkualitas dan berdampak positif bagi peningkatan demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad., 2006, *Sistem Pemilihan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- , 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Firmanzah, 2008, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Affan., 2000, *Sistem Politik di Indonesia*,

Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Marijan, Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Langsung*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Mubarok, M. Mufti, 2005, *Sukseksi Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*, Surabaya: Java Pustaka.
- Neuman, W. Lawrence., 1991, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Bacon.
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia.
- Pradhanawati, Ari, 2005, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta: KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Asep, 2004, *Memahami Perilaku Pemilih pada Pemilu 2004 di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 4, No. 1. 2004.
- Satoto, dkk., 2003, *Pilkada di Era Otonomi: Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal*, Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Upe, Ambo, 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer, Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Surbakti, Ramlan., 1998, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.